



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Kantor Sementara Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara
Gowa, Jl. H. M. Yasin Limpo, Romangpolong, Kec. Somba Opu,
Kab. Gowa (92113) Sulawesi Selatan Telp.: (+62-411) 8984475

SIARAN PERS

SERAH TERIMA LKPD *UNAUDITED* TA 2020 PEMKAB MAJENE

Gowa – Humas dan TU Perwakilan

Senin (06/04) – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan serah terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Majene *Unaudited* TA 2020 dan *Entry Meeting* Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Majene. Hal tersebut dilaksanakan mengingat laporan keuangan pemerintah terlebih dahulu harus diaudit BPK sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD.

LKPD *Unaudited* TA 2020 Kabupaten Majene diterima langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK RI **Hery Ridwan**, dari Bupati Majene **Lukman** yang didampingi oleh Inspektur dan Kepala BKAD Kabupaten Majene **Abd. Rahim** dan **Kasman**.

Dalam sambutannya, Hery Ridwan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Majene yang telah menyampaikan LKPD TA 2020 *Unaudited* kepada BPK di tengah bencana Gempa Bumi yang melanda Kabupaten Majene pada Jumat, 15 Januari 2021 lalu karena mampu menyelesaikan LKPD yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Hery Ridwan menyampaikan bahwa BPK akan segera melakukan proses pemeriksaan terinci atas LKPD TA 2020 yang telah diserahkan tersebut dengan berlandaskan nilai-nilai Independensi, Integritas dan Profesionalisme serta mengajak Pemerintah Kabupaten Majene beserta jajarannya untuk mendukung kelancaran pemenuhan data/dokumen maupun informasi/keterangan yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa hingga proses pemeriksaan berakhir.

“Kami harapkan komitmen dan dukungan Pemerintah Majene beserta jajarannya untuk mendukung kelancaran pemenuhan data/informasi maupun informasi/keterangan yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa hingga proses pemeriksaan berakhir,” terang Hery Ridwan.

SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT